



Determinan Tingkat Pengangguran : Peran Infasi dan Upah Minimum Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Sampai 2023

Syarifah¹, Dhea Amanda², Nur Indah Melani Aruan³, Monalisa Lumbantobing⁴, Dodi Jese Rianto Siburian⁵

Universitas Negeri Medan

Syapehh17@gmail.com , Mandadhea1101@gmail.com , nurindaharuan@gmail.com ,
monalisatobing8008@gmail.com , Dodisiburian17@gmail.com

Alamat : Jl. Willem Iskandar Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : Syapehh17@gmail.com

Abstract. *High unemployment has become a significant issue in the province, which has great economic potential but faces challenges in reducing unemployment. In this analysis, economic and employment data of North Sumatra Province during the period were used to understand the relationship between inflation, minimum wage, and unemployment rate. The results of the analysis show that inflation has a significant influence on the unemployment rate in North Sumatra Province. High inflation can reduce people's purchasing power and create uncertainty in the labor market. In addition, the study also found that the minimum wage plays an important role in influencing the unemployment rate. Setting a minimum wage that is unbalanced or too high compared to labor productivity can limit the growth of new jobs.*

Keywords : *unemployment, ump, inflation*

Abstrak. *Tingkat pengangguran yang tinggi telah menjadi isu yang signifikan di provinsi ini, yang memiliki potensi ekonomi yang besar namun menghadapi tantangan dalam mengurangi angka pengangguran. Dalam analisis ini, data ekonomi dan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara selama periode tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara inflasi, upah minimum, dan tingkat pengangguran. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa upah minimum memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan upah minimum yang tidak seimbang atau terlalu tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja dapat membatasi pertumbuhan lapangan kerja baru.*

Kata Kunci : *pengangguran, ump, inflasi*

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan suatu perekonomian. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran sangatlah penting bagi pembuat kebijakan dan para pengambil keputusan ekonomi. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran telah menjadi isu yang signifikan selama periode tahun 2009 hingga 2023. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang

relatif tinggi. Dalam artikel ini, akan dianalisis peran inflasi dan upah minimum dalam mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara selama periode tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa di suatu perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pasar tenaga kerja, karena dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi keputusan pengusaha dalam merekrut tenaga kerja baru. Selain itu, inflasi yang tidak stabil juga dapat menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain inflasi, upah minimum juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Peningkatan upah minimum dapat mempengaruhi keputusan pengusaha dalam merekrut pekerja baru atau mempertahankan pekerja yang ada. Jika peningkatan upah minimum terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan produktivitas tenaga kerja, pengusaha mungkin akan mengurangi jumlah pekerjaan atau membatasi pertumbuhan pekerjaan baru.

Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis terhadap data ekonomi dan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2009 hingga 2023 untuk melihat hubungan antara inflasi, upah minimum, dan tingkat pengangguran. Dengan memperhatikan periode waktu yang cukup panjang, diharapkan dapat ditemukan pola atau tren yang relevan dalam pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di provinsi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

- **Pengangguran**

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam 1. Pengangguran Terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. 2. Setengah Menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu. 3. Pengangguran Terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, namun sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu faktor banyaknya pengangguran adalah sedikitnya angkatan kerja yang

berkompeten. Budaya malas juga menjadi salah satu factor makin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Selain itu, pengangguran juga dapat terjadi karena pertimbangan biaya ekonomi dari pengusaha untuk tidak mempekerjakan semua pelamar kerja (pengangguran friksional). Walaupun pengangguran friksional bersifat sementara ketika seseorang baru saja meninggalkan pekerjaannya, namun jenis pengangguran lainnya dapat memberikan dampak jangka panjang bagi individu maupun perekonomian suatu negara. Secara makro, pengangguran dapat menyebabkan penurunan output ekonomi dan daya beli masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan memperparah perekonomian negara. Dari sisi mikro, pengangguran dapat menurunkan rasa kepercayaan diri individu serta menimbulkan tekanan psikologis berupa stres dan depresi. Dalam jangka panjang, pengangguran berisiko meningkatkan kemiskinan dan permasalahan kesehatan mental. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya pengangguran. Upaya yang dilakukan antara lain mempercepat pertumbuhan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja melalui insentif bagi dunia usaha, meningkatkan keterampilan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memberikan bantuan sosial seperti tunjangan pengangguran.

Terdapat beberapa penyebab utama yang dapat menimbulkan terjadinya pengangguran baik di tingkat individu maupun struktural. Pada tingkat individu, penyebab pengangguran dapat berasal dari ketidakcocokan antara kompetensi pelamar kerja dengan persyaratan pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya atau kekurangan keterampilan dari pelamar kerja sehingga tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Faktor lainnya adalah adanya perubahan teknologi yang cukup pesat, seperti maraknya otomatisasi dan digitalisasi.

Perubahan ini berpotensi menggantikan banyak tenaga kerja manusia dengan mesin dan sistem otomatis. Selain itu, rendahnya motivasi dari sebagian pelamar kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan vokasi juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran. Sedangkan pada tingkat struktural, penyebab pengangguran berasal dari faktor ekonomi makro seperti melemahnya perekonomian yang berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha melakukan efisiensi operasional dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Selain itu, fluktuasi siklus bisnis yang terjadi secara berkala juga berpotensi menimbulkan pengangguran massal ketika

perekonomian mengalami resesi. Dengan demikian, berbagai faktor tersebut dapat menjadi penyebab utama terjadinya persoalan pengangguran.

- **Inflasi**

Menurut (Nopirin, 2014) Inflasi adalah proses kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi barang umum secara terus menerus. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak lah bersamaan. Yang penting terhadap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang hanya terjadi sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukan lah merupakan inflasi Menurut (Putong, 2017) Inflasi di hitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat Pertumbuhan Ekonomi (barang- barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat). Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi itu disusun suatu angka indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing Pertumbuhan Ekonomi nya disebut sebagai indeks Pertumbuhan Ekonomi Konsumen (HK). Keterkaitan antara inflasi dengan pengangguran dapat dijelaskan dalam kurva Phillips, yang menyatakan bahwa pada tingkat pengangguran yang rendah cenderung disertai oleh inflasi yang tinggi dan saat pengangguran tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah (Samuelson & Nordhaus, 2010). Hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat.

Para ekonom telah mencoba membangun hubungan antara inflasi dan pengangguran. Kedua variabel ini saling terkait secara ekonomi. Hubungan yang ada di antara mereka berkorelasi terbalik. Ketika pengangguran tinggi, inflasi rendah dan sebaliknya Jelilov & Obasa (2016). Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950-an. A.W. Philips di dalam tulisannya dengan judul *The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of money Wage rate in the United Kingdom*. Studi yang dilakukan A.W Philips mengenai hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran pada para pekerja di Inggris pada tahun 1957–1986. Hasil studi membuktikan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran.

Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi. Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan

inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran (tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena harus ada trade off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Kurva Philips menggambarkan keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran: semakin tinggi tingkat pengangguran akan semakin rendah laju inflasi. Penurunan tingkat pengangguran akan selalu dapat dipertahankan dengan mendorong laju kenaikan inflasi, dan sebaliknya laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran. Dengan kata lain kurva Philips memberikan kesimpulan adanya trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran Hasyim, (2016:16).

- **Upah Minimum Provinsi (UMP)**

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. UMP merupakan jumlah upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di sektor formal dalam suatu provinsi. UMP ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, perkembangan ekonomi daerah, serta kesepakatan antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. UMP memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan menetapkan tingkat upah minimum, diharapkan pekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, sandang, tempat tinggal, dan pendidikan. UMP juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah antara pekerja dengan tingkat keterampilan yang berbeda, serta mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Kebijakan UMP, diterapkan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan meningkatnya upah minimum, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pekerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja tereksplorasi, terutama yang memiliki low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan dan menurunkan penawaran tenaga kerja (Mansur, Engka, & Tumangkeng, 2014). Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Kaufman & Hotchkiss, 1999).

Meskipun UMP memiliki tujuan yang baik dalam melindungi pekerja, ada juga perdebatan tentang dampaknya terhadap pasar tenaga kerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa peningkatan UMP dapat mengakibatkan penurunan lapangan kerja, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah yang mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa UMP dapat mendorong konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Secara keseluruhan, UMP merupakan instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penentuan UMP harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, serta dilakukan dengan keterlibatan semua pihak terkait demi mencapai keseimbangan yang adil antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha.

METODE

- **Jenis dan Sumber Data**

Sumber Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder itu sendiri adalah data yang diperoleh dari instansi atau pihak lainnya. Bentuk data dapat diperoleh dari publikasi yang disajikan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal Badan Pusat Statistik (BPS).

- **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan studi kepustakaan (Libray Research) penelitian ini dengan metode kepustakaan adalah satu teknik pengumpulan data dengan mengutip langsung data tersebut dari jurnal-jurnal, buku, seta media informasi lainnya yang dipublikasikan langsung oleh suatu instansi secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara menyusun dalam bentuk tabulasi data dari hasil pencarian data yang didapat pada sumber data yang telah tentukan, kemudian nantinya akan di uji dengan alat bantu statistik yaitu eviews 10.

HASIL & PEMBAHASAN

Langkah awal dalam melakukan regresi Error Correction Model (ECM), adalah dilakukannya uji stasioneritas pada variabel-variabel yang akan diteliti. Uji stationer ini

digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam penelitian ini stationer atau tidak. Apabila ditemukan data yang tidak stationer maka data tersebut ketika diregresi akan menunjukkan data yang bias (palsu). Pada penggunaan metode ECM, data yang dibutuhkan adalah data yang stationer pada tingkat 1st-difference. Untuk mengetahui bahwa data yang digunakan stationer atau tidak. Ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Pertama, kita perlu melakukan uji akar unit atau unit stasioner dengan tingkat kepercayaan 5%. Jika probabilitas lebih besar dari 5%, data dianggap tidak stasioner, dan kita dapat melanjutkan dengan persamaan ECM yang sesuai. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 5%, data dianggap stasioner, dan proses formulasi ECM dapat dilanjutkan. Jika data belum stasioner pada tingkat tersebut, kita akan melanjutkan dengan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat 1st difference. Jika data sudah stasioner pada tingkat 1st difference, kita dapat melanjutkan analisis dengan ECM. Namun, jika data masih tidak stasioner, uji akan terus dilakukan hingga data mencapai tingkat stasioner yang diinginkan. Berikut adalah hasil uji stasioneritas.

			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.291553	0.0444
Test critical values:	1% level		-4.297073	
	5% level		-3.212696	
	10% level		-2.747676	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations				
and may not be accurate for a sample size of 10				

Nilai t-Statistic menunjukkan angka -3.291553 yang berarti stasioner namun nilai probnya 0.00217 atau > 0.05 artinya lolos uji stasioner

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root				
Exogenous: Constant				
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-5.116047	0.0021
Test critical values:	1% level		-4.121990	

	5% level		-3.144920	
	10% level		-2.713751	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations				
and may not be accurate for a sample size of 12				

Hasil uji diatas memperlihatkan nilai probabilitasnya diatas 0.0006 (> 0.05) artinya lolos uji stasioner

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root				
Exogenous: Constant				
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.857252	0.0141
Test critical values:	1% level		-4.057910	
	5% level		-3.119910	
	10% level		-2.701103	

Berdasarkan tabel hasil uji stasioneritas di atas, telah memenuhi syarat lolos uji stasioner yakni nilai t-Statistic bernilai positif dan nilai Probabilitasnya 0.0021 (< 0.05). Nilai t-Statistic sebesar 5.116047 menandakan berada di level 1%. Untuk membuktikan bahwa data ini telah lolos uji stasioner maka dapat dilihat dari graph dibawah dimana trend kenaikann dan penurunannya telah dinyatakan dengan jelas.

Estimasi Jangka Pendek

Uji kointegrasi merupakan tahap berikutnya setelah uji sebelumnya, yaitu uji akar unit (Unit Root Test). Uji ini merupakan pengujian yang populer, dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test Setelah semua variabel dinyatakan stasioner, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi untuk mengevaluasi apakah data penelitian memiliki kointegrasi dalam jangka panjang atau tidak. Hal ini juga membantu dalam menilai integrasi keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut. Dalam uji ini, metode Augmented Dickey-Fuller digunakan dengan fokus pada apakah residual regresi kointegrasi adalah stasioner atau tidak. Untuk melanjutkan ke

tahap berikutnya, yaitu menggunakan metode Error Correction Model, syaratnya adalah bahwa residual harus stasioner pada tingkat level.

Dependent Variable: X1				
Method: Least Squares				
Date: 05/30/24 Time: 17:28				
Sample: 2009 2023				
Included observations: 15				
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2	8.051795	20.54952	0.391824	0.7021
Y	310.0345	71.96088	4.308376	0.0010
C	-1890.323	458.5047	-4.122799	0.0014
R-squared	0.619415	Mean dependent var		120.8652
Adjusted R-squared	0.555984	S.D. dependent var		314.8512
S.E. of regression	209.7996	Akaike info criterion		13.70704
Sum squared resid	528190.3	Schwarz criterion		13.84865
Log likelihood	-99.80279	Hannan-Quinn criter.		13.70553
F-statistic	9.765206	Durbin-Watson stat		1.733572
Prob(F-statistic)	0.003039			

Berdasarkan tabel hasil uji kointegrasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai probability variabel ECT sebesar $0.0014 < 0.05$. Hal tersebut memberikan informasi bahwa variabel ECT stasioner pada level dan secara tersirat menyatakan bahwa UMP, Inflasi dan Pengangguran saling berkointegrasi sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap estimasi persamaan jangka Panjang.

Estimasi Jangka Panjang

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root

Exogenous: Constant			
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)			
		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.857252	0.0141
Test critical values:	1% level	-4.057910	
	5% level	-3.119910	
	10% level	-2.701103	

Dari data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMP dan Inflasi berpengaruh karena nilai probabilitas menunjukkan angka dibawah 0.05. Disisi lain nilai R-squared cukup signifikan yakni 0.574935 atau 57% terhadap PDRBHK.

1. Koefisien variabel UMP sebesar 1.079799 yang berarti setiap kenaikan UMA sebesar 1 Milyar maka akan menaikkan Pengangguran sebesar 1.079799
2. Koefisien variabel Inflasi sebesar 0.132518 yang berarti setiap kenaikan Ekspor sebesar 1 Milyar maka akan menaikkan Pengangguran sebesar 0.132518

Dari hasil persamaan model ECM di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Diperoleh konstanta sebesar -34.39630 yang berarti jika asumsi variabel independen yaitu Pengangguran, Inflasi Dan UMP sama dengan 0 atau kontan, maka nilai Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 34.39%.
- 2) Koefisien regresi variabel inflasi sebesar 20.51723 yang berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1 jiwa maka akan mengalami peningkatan Penduduk Miskin sebesar 20.51%
- 3) Koefisien regresi variabel pengangguran sebesar 144.4610 yang berarti setiap penurunan Angkatan kerja sebesar 1 jiwa maka akan mengalami peningkatan Penduduk Miskin sebesar 144 %.
- 4) Nilai koefisien ECT yaitu sebesar -0.808485 yang berarti ketika terdapat ketidakseimbangan di tahun sebelumnya sebesar 100 persen, maka pertumbuhan penduduk miskin akan menyesuaikan diri dengan penurunan sebesar 0.8%.

Uji Multikolinearitas

Multikolinier adalah situasi adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Konsekuensinya meskipun hasil estimasi masih BLUE (Best Linear Unbiased

Estimator), akan tetapi multikolinieritas dapat menyebabkan standard error yang lebih besar, nilai koefisien determinasi (R^2) tetap tinggi dan uji F-stat signifikan meskipun banyak variabel yang tidak signifikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sebuah model persamaan dinyatakan terdapat gangguan multikolinear apabila R^2 -nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel bebasnya yang signifikan pada pengujian t-statistik.

Menurut Ghazali (2018; 71) pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dasar pengambilan keputusan pengujian ini sebagai berikut (Ghozali, 2018: 112).

1. Jika nilai korelasi $> 0,80$ maka ada masalah multikolinieritas.
2. Jika nilai korelasi $< 0,80$ maka tidak ada masalah multikolinieritas.

Variance Inflation Factors			
Date: 05/30/24 Time: 17:36			
Sample: 2009 2023			
Included observations: 14			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
D(X2)	194.7575	1.060611	1.060555
D(Y)	5712.787	1.091212	1.008139
ECT(-1)	0.064475	1.053105	1.052764
C	2492.171	1.083833	NA

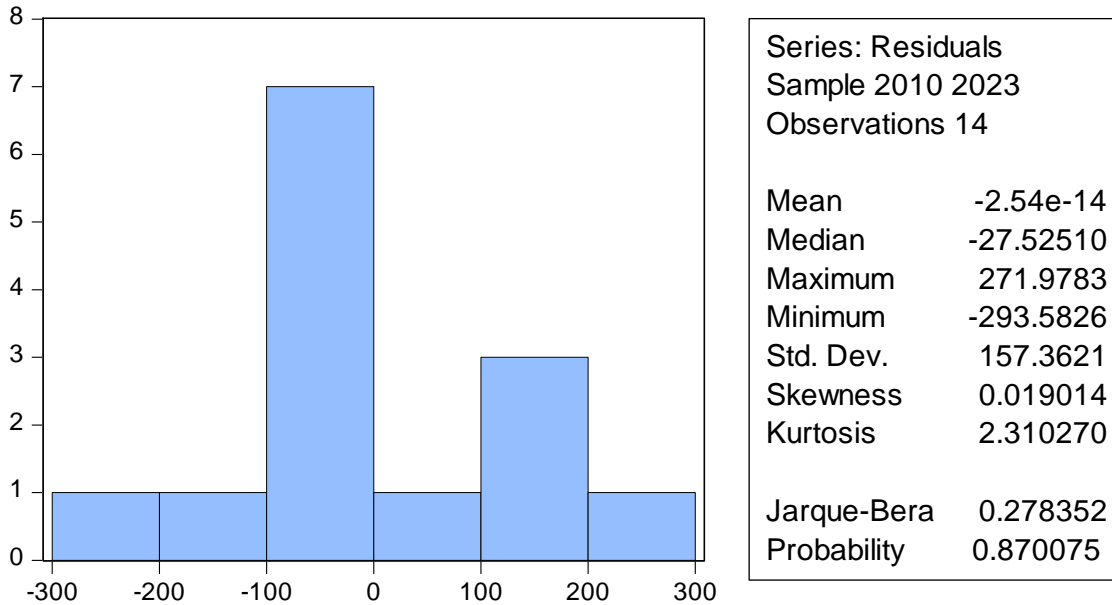
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi normalitas adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

HA: Data residual tidak berdistribusi normal



Dapat dilihat nilai Prob. Chi-Square $0.870075 > 0.05$ maka tidak ada masalah pada uji normalitas.

Uji Autokorelasi

Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika terbebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang (Ajija, 2011). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier.

Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Durbin Watson Test dengan menentukan nilai durbin watsn (DW). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana

pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.

Dalam penelitian ini, mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan LM Test. Uji LM adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan common effect atau random effect. pada uji Lagrange Multipliers jendela Eviews mengharuskan pada jendela equation biasa (bukan entry seperti pada data pool), hal ini karena yang diperbandingkan adalah pada model common effect (regresi OLS biasa).

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.066780	Prob. F(2,8)	0.9359
Obs*R-squared	0.229892	Prob. Chi-Square(2)	0.8914

Dapat dilihat nilai Prob. Chi-Square $0.8914 > 0.05$ maka tidak ada masalah pada uji autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE adalah var (ui) harus sama dengan σ^2 (konstan), atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homoskedastis. Sedangkan apabila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis. Uji formal untuk masalah ini salah satunya adalah Uji White / White-Test.

Uji heterokedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Menurut Ghozali (2013) "Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain". Kebanyakan data

cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	17.07041	Prob. F(3,10)	0.0003
Obs*R-squared	11.71284	Prob. Chi-Square(3)	0.0084
Scaled explained SS	3.915045	Prob. Chi-Square(3)	0.2708

Dapat dilihat nilai Prob. Chi-Square $0.0084 > 0.05$ maka tidak ada masalah pada uji heteroskedastisitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, pengusaha cenderung berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja baru karena mereka ingin mengendalikan biaya produksi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan lapangan kerja dan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain inflasi, penelitian ini juga menemukan bahwa upah minimum memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan upah minimum yang tidak seimbang atau terlalu tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja dapat memiliki dampak negatif terhadap pembukaan lapangan kerja baru. Ketika biaya tenaga kerja meningkat secara signifikan, pengusaha mungkin enggan merekrut pekerja baru atau bahkan mengurangi jumlah pekerja untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran yang relatif tinggi menjadi tantangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, seperti inflasi dan upah minimum, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan ekonomi.

Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang stabil. Selain itu, penyesuaian upah minimum yang seimbang dengan produktivitas tenaga

kerja juga menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dan menyesuaikan penetapan upah minimum dengan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mengurangi tingkat inflasi yang berlebihan. Selain itu, evaluasi terhadap upah minimum yang berlaku perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data ekonomi dan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2009 hingga 2023, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait peran inflasi dan upah minimum dalam mempengaruhi tingkat pengangguran upah minimum juga memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Penetapan upah minimum yang tidak seimbang atau terlalu tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja dapat mempengaruhi keputusan pengusaha dalam merekrut atau mempertahankan pekerja. Peningkatan upah minimum yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja dapat membatasi pertumbuhan lapangan kerja baru atau bahkan menyebabkan pengurangan pekerjaan.

Oleh karena itu, penentuan upah minimum yang proporsional dan berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi daerah menjadi penting bagi pengurangan tingkat pengangguran di provinsi ini. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, untuk mengatasi masalah tingkat pengangguran yang relatif tinggi, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah perlu memperhatikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang efektif. Dengan menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, dan ketidakpastian di pasar tenaga kerja dapat dikurangi

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, R. S. (2019). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 14(1), 105–124.

- Febriansyah, M. Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Bungo Periode 2000-2022. *Diss. Universitas Jambi*, 2023.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajji, M. S., & Nugroho, SBM. (2013). Analisis Pdrb, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011. Diponegoro *Journal of Economic*, 2(1998), 1–10.
- Intan Permata Sari Br Sembiring, S. S. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2006-2020. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, & Bisnis*, 1-13.
- Nachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. LPFEUI. 2006.
- Normalita, Anggarda. (2018). "Analisis Hubungan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Variable Makro dan Indeks Dow Jones Terhadap Pergerakan IHSG (Periode Oktober 2014-Agustus 2017)."
- Soekapdjo, S. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 92-102.
- Syafitri, Aidila, Yusrizal Yusrizal, and Khairina Tambunan. "Analisis Determinan Tingkat Pengangguran di Kab Langkat." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1.3 (2023): 108-124.
- Syamiya, Estu Niana, Hudaya Latuconsina, and Alfia Rahmah. "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Literasi Digital Terhadap Pengangguran." *Jurnal Ecogen* 6.4 (2023): 495-507.
- Winra Purba, P. N. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 62-74.
- Yarlina Yacoub1 , Maulidiah Firdayanti (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat .*Prosiding SATIESP*.